PERUBAHAN RENJA





















DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN BOJONEGORO



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Perubahan APBD Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun 2024 ini mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P). Dokumen Perubahan Rencana Kerja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Dalam proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD. Perubahan Renja memuat tentang indikator-indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran outcome yang secara langsung dan tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Untuk mencapai tingkat keberhasilan terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sasaran pembangunan sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P), serta sebagai pedoman di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Anggaran Perubahan APBD Tahun 2024.

i

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun Anggaran 2024. Semoga petunjuk dan ridho Allah SWT senantiasa mengiringi di setiap langkah pengabdian kita dalam membangun Bojonegoro yang Produktif dan Energik.

Bojonegoro, 7 Agustus 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN BOJONEGORO

SATITO HADI, ST., MT.

Bo Pembina Tingkat I NIP. 19720625 200112 1 004

i

DAFTAR ISI

KATA PEN	NGANTA	AR	1
DAFTAR I	SI		ii
BAB I	PEN	DAHULUAN	
	1.1.	Latar Belakang	I-1
	1.2.	Maksud dan Tujuan	I-2
	1.3.	Landasan	I-3
	1.4.	Sistematika Penulisan	I-3
BAB II	EVA	LUASI PELAKSANAAN RENJA PD S/D TRIBULAN II	
	2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Perkiraan Capaian Renstra s/d	
		Semester I	II-2
	2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan-PD	II-9
	2.3.	Faktor Penghambat dan Pendorong Tugas dan Fungsi PD	II-12
BAB III	REN	CANA KERJA DAN PENDANAAN PD	
	3.1.	Program dan Kegiatan Perubahan Renja 2023	III-1
	3.2.	Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan APBD 2023	III-5
BAB IV	PEN	NUTUP	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara Perubahan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk sasaran Perangkat Daerah harus dapat mendukung percepatan pencapaian target sasaran daerah sedangkan nomenklatur program dan kegiatan harus menyesuaikan dengan sasaran daerah maupun perangkat daerahnya. Selanjutnya Perubahan Rencana kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan serta untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna optimalisasi pelayanan pada masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Secara sistematis dan terorganisir, melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;

Sedangkan Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun 2024 antara lain :

- a. Sebagai alat evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Renja semester I Tahun 2024 sebagai bahan penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024;
- Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran maupun Prioritas dalam plafon Perubahan Anggaran (KUA-PPAS) Tahun 2024 untuk dijadikan pedoman dalam Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

1.3. LANDASAN

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Perangkat Daerah;
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- f) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro.
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024..
- h) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.4. SISTEMATIKA RKPD PERUBAHAN

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II

Tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta

Karya

BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro

BAB IV : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 DINAS PKP CIPTA KARYA KABUPATEN BOJONEGORO

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 adalah penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024. Dalam proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD.

Kualitas Rerja Perangkat Daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan Daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Agar dokumen Renja yang disusun berkualitas, maka diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah serta RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2025.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023 capaian Rencana Kerja Tahun 2024 dan capaian target Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mengevaluasi program/kegiatan Tahun 2024 semester satu yang memenuhi target kinerja dan hasil/keluaran yang telah direncanakan.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026 memiliki Tujuan "Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur permukiman dan keciptakaryaan". Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro adalah:

 Meningkatnya akses perumahan dan kawasan permukiman yang layak untuk masyarakat, dengan program yang mendukung adalah Program Kawasan Permukiman, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, dan Program Pengembangan Permukiman.

- 2. Meningkatnya kualitas bangunan Gedung strategis dan publik yang layak, dengan program yang mendukung adalah Program Penataan Bangunan Gedung.
- 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah, dengan program yang mendukung adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Sedangkan untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD semester satu dan pencapaian Renstra PD.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja semester satu untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja pogram dan kegiatan serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan yang dihadapi diperlukan adanya perubahan Renja Tahun 2024 dalam rangka perbaikan kinerja dan efisiensi anggaran.

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PERKIRAAN CAPAIAN RENSTRA SAMPAI DENGAN SEMESTER SATU.

1. Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 (Triwulan II/Semester I)

Hasil Capaian Renja dan Renstra Tahun 2024 sampai dengan triwulan II (semester I) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Dari dari laporan progress per 30 Juni 2023 terlihat bahwa realisasi capaian fisik Dinas PKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro mencapai 16,05% dan realisasi penyerapan anggaran sebesar 12,63%.

Adanya perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan keuangan dan anggaran berdampak sangat signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak sesuai dengan rencana penyerapan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa kendala ini dapat di minimalisir dengan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan yang tidak berdampak langsung dengan perjanjian kerjasama atau kegiatan rutin yang telah sesuai dengan jadwal penyerapan pada Rencana Anggaran Kas (RAK) serta percepatan pelaksanaan kegiatan, perencanaan pembangunan fisik serta pengajuan lelang.

Dari data sebagaimana Tabel 2.1 tersebut di atas, evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan semester satu Tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebagai berikut :

- 1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan semester satu Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 3
 (tiga) Urusan, 10 (sepuluh) program dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja program, dan 15 (lima belas) kegiatan dengan 15 (lima belas) indikator kegiatan.
 - b. Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja program tersebut masih dalam proses pencapaian target.
 - c. Dari 15 (lima belas) indikator kinerja kegiatan tersebut masih dalam proses pencapaian target.
- Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan
 Semester Satu Tahun 2024 sebagai berikut :
 - a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 3 (tiga) Urusan, 10 (sepuluh) program dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja program, dan 15 (lima belas) indikator kegiatan dengan 47 (empat puluh tujuh) indikator sub kegiatan.

- b. Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja program tersebut masih dalam proses pencapaian target.
- c. Dari 15 (lima belas) indikator kinerja kegiatan tersebut masih dalam proses pencapaian target.

2. Evaluasi Capaian Anggaran Tahun 2024 (Triwulan II/ Semester I)

Berikut ini laporan penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II (semester I) Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.2

LAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro

Triwulan II / Semester I Tahun 2024

		A	nggaran	
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
URU	SAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BER	KAITAN DENGAN PE	LAYANAN DASAR	
URU	SAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJA	AN UMUM DAN PEN	ATAAN RUANG	
1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	165.932.488.620	9.589.077.704	5,78
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	165.932.488.620	9.589.077.704	5,78
	Sub Kegiatan : Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	165.932.488.620	9.589.077.704	5,78
2.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	41.731.334.400	1.565.912.205	3,75
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota	41.731.334.400	1.565.912.205	3,75
	Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	492.000.000	-	0,00
	Sub Kegiatan : Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	41.239.334.400	1.565.912.205	3,8
3.	Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	144.213.450.109	27.254.761.786	18,9

	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota	144.213.450.109	27.254.761.786	18,9
	Sub Kegiatan: Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	139.037.453.045	26.276.421.000	18,9
	Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	3.877.417.000	556.000.768	14,34
	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana,Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	1.298.580.064	422.340.018	32,52
4.	Program: PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	598.150.973.821	19.495.941.678	8,27
	Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	598.150.973.821	19.495.941.678	8,27
	Sub Kegiatan: Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	43.883.893.750	914.088.069	2,38
	Sub Kegiatan: Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	553.056.601.296	18.457.793.609	9,4
	Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	564.258.775	102.900.000	15,26
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	646.220.000	21.160.000	6,64
URU	SAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMA	HAN DAN KAWASAN	PERMUKIMAN	
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	500.000.000	-	0,00
	Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	500.000.000	-	0,00
	Sub Kegiatan: Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	500.000.000	-	0,00
6.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	29.513.012.300	895.345.509	3,03

	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	29.513.012.300	895.345.509	3,03
	Sub Kegiatan: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	23.562.172.300	841.994.509	3,57
	Sub Kegiatan: Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	5.950.840.000	53.351.000	0,9
7.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	124.492.760.384	20.505.107.776	16,47
	Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	124.492.760.384	20.505.107.776	16,47
	Sub Kegiatan: Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	58.676.771.976	14.238.863.068	24,27
	Sub Kegiatan: Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.000.000.000	39.707.000	3,97
	Sub Kegiatan: Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	64.645.988.408	6.215.237.708	9,61
	Sub Kegiatan: Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	170.000.000	11.300.000	6,65
8.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.237.067.137	22.381.431.624	40,52
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	303.000.000	69.938.600	23,08
	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.000.000	31.300.900	52,17
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	58.000.000	11.833.100	20,40
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.000.000	4.121.500	16,49
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000	19.450.500	48,63
	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.000.000	3.232.600	2,69
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.603.603.624	5.299.498.572	38,96
	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.904.173.624	4.734.639.172	39,77
	Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.477.430.000	490.635.800	33,21

Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	113.000.000	42.756.000	37,84
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	37.600.000	14.706.800	39,11
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36.400.000	-	0,00
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	35.000.000	16.760.800	47,89
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	308.272.755	52.351.490	16,98
Sub Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	168.506.055	48.352.490	28,69
Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	139.766.700	3.999.000	2,86
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.098.356.065	279.064.352	25,41
Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.242.400	18.542.550	83,37
Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	219.679.019	57.471.044	26,16
Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	107.060.400	56.656.658	52,92
Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.435.000	-	0,00
Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.021.540	15.575.500	38,92
Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.960.000	1.300.000	10,03
Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan/Material	4.435.406	4.253.600	95,90
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	566.520.900	89.345.000	15,77
Sub Kegiatan: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	101.001.400	35.920.000	35,56
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	614.841.437	426.247.700	69,33
Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	614.841.437	426.247.700	69,33

	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.580.884.056	15.961.165.360	42,47
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.072.000.000	15.358.509.055	42,58
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.508.884.056	602.656.305	39,94
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.728.109.200	293.165.550	16,96
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	689.521.300	222.285.050	32,24
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	315.930.000	70.880.500	22,44
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	222.657.900	-	0,00
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000	-	0,00
URU	SAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANA	MAN		
10.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	8.250.000.000	44.184.479	0,54
	Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.250.000.000	44.184.479	0,54
	Sub Kegiatan: Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.250.000.000	44.184.479	0,54
	JUMLAH TOTAL	805.578.654.781	101.768.827.871	12,63

Tabel 2.3

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro

Triwulan II / Semester I Tahun 2024

NO	ОВҮЕК	TARGET	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE
1	-	-	-	- %
	JUMLAH	-	-	- %

Data realisasi serapan anggaran pada periode bulan Januari sampai Juni 2024 sebesar Rp. 101.768.827.871,- (Seratus Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dengan persentase sebesar 12,63%. Serapan anggaran tidak mencapai target masih sangat rendah dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan keuangan, membutuhkan penyesuaian dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan. Selain itu juga dikarenakan pekerjaan fisik masih dalam proses pelaksanaan jadi belum ada progress pencairan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro, serta Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro disamping mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dan tugas pembantuan.

Secara makro, Kinerja pelayanan PD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro meliputi 3 urusan Pemerintahan:

- a) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.
 - 1. Merencanakan, melaksanakan dan mengordinasikan kegiatan di lingkup Bidang Tata Bangunan.
 - 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dilingkup Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

- Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di lingkup Bidang Penerangan Jalan Umum dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Keciptakaryaan.
- b) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
 - Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dilingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- c) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN.
 - 1. Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dilingkup Bidang Pertanahan, Permakaman.

Adapun Hasil Capaian Renja dan Renstra triwulan II (semester I) Tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dapat disampaikan pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Hasil Capaian Renja dan Renstra Tahun 2024 (Triwulan II / Semester I)

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET RENSTRA s/d 2024	TARGET RENJA 2024	REALISASI RENJA 2024	CAPAIAN RENJA 2024
1	Meningkatnya akses perumahan dan kawasan	Persentase Rumah Layak huni yang tersedia	%	92	100	97,05	97,05%
	permukiman yang layak untuk masyarakat	Persentase Rumah tangga berakses air minum	%	23,39	23,10	22,64	98,01%
		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi dasar	%	90,70	90,80	90,31	99,46%
		Persentase sarana dan prasarana sistem drainase wilayah kota yang memadai	%	53,73	58,49	53,62	91,67%

		Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	%	51,06	58,68	51,22	87,29%
		Persentase PJU yang berfungsi baik	%	33,56	41,13	34,31	83,42%
2	Meningkatnya kualitas bangunan Gedung Strategis dan Publik yg Layak	Rasio bangunan gedung aparatur dan publik yang layak fungsi	%	78,64	81,82	80,95	98,94%

Data capaian sasaran strategis Renja terhadap Renstra pada kurun waktu triwulan II/ semester I tahun 2024 sudah sangat tinggi dikarenakan adanya usulan oleh berbagai pemangku kepentingan (stake holder), baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan Dinas PKP Cipta Karya, maupun dari kelompok masyarakat yang tidak berkepentingan dengan Dinas PKP Cipta Karya seperti dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non Government Organization (NGO), asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, dan lainlain.

2.3. FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam lingkup penanganan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, terdapat faktor-faktor penting baik yang mendorong maupun yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro antara lain:

- A. Faktor Penghambat pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran :
 - 1. Perlu adanya kejelasan tugas dan fungsi sehingga memperjelas kewenangan apa saja yang bisa dilaksanakan oleh DPKPCK.

- Belum optimalnya sinergi, sinkronisasi dan koordinasi tingkat kota khususnya terkait pencapaian target RPJMD mengingat ada beberapa indikator kinerja yang tidak hanya menjadi tugas dan fungsi satu Perangkat Daerah saja untuk memenuhinya.
- Terbatasnya anggaran yang dialokasikan pada DPKPCK Kabupaten Bojonegoro untuk melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya.
- 4. Perlunya prioritas program dan kegiatan yang menjadi target utama yang harus dipenuhi dalam RPJMD sehingga program prioritas menjadi perhatian utama dengan mendapat porsi pendanaan yang lebih (Money Follow Program).
- 5. Kurangnya jumlah ASN dan perlunya peningkatan kapasitas pada beberapa ASN yang ada di DPKPCK. Proses percepatan dan peningkatan kinerja DPKPCK sering terhambat karena program dan kegiatan yang dilakukan belum sebanding dengan jumlah ASN yang ada sehingga beban pekerjaan menjadi over load (beban kerja tidak didukung dengan ASN yang seimbang)

B. Tindak lanjut:

- Perlu adanya sinergi, koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan program antar Perangkat Daerah dalam rangka percepatan pencapaian dari visi dan misi pemerintah Kabupaten Bojonegoro, misalnya terkait pencapaian targetan ketersediaan akses air minum, sanitasi penanganan kumuh dll.
- Kabupaten Bojonegoro perlu melakukan updating data di beberapa bidang pendataan, dimana dalam pelaksanaannya terkoordinasi dan terintegrasi lintas Perangkat Daerah agar data yang dihasilkan bisa dioptimalkan tingkat kemanfaatannya dan bisa diakses oleh lintas Perangkat Daerah.
- Perlu adanya dukungan anggaran yang cukup untuk melaksanakan kegiatan agar Perangkat Daerah bisa memenuhi targetan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra.

- 4. Perlu adanya percepatan dalam pengesahan PAPBD sehingga bisa ditetapkan tepat waktu, adanya kemunduran dari jadwal yang sebenarnya bisa menjadikan kegiatan tidak bisa terlaksana karena waktu pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi.
- 5. Perlunya penambahan SDM dimana SDM yang ditambahkan merupakan sarjana teknik yang bisa mendukung pembangunan infrastruktur seperti halnya teknik sipil, arsitektur maupun planologi.
- 6. Perlunya optimalisasi penataan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- 7. Perlunya peningkatan kapasitas dan kelancaran saluran drainase dan pematusan lainnya untuk mendukung kinerja jalan dan upaya mencegah terjadinya genangan pada ruas-ruas jalan kota;
- 8. Perlunya penyediaan sistem air limbah skala kawasan/kota;
- 9. Perlunya peningkatan kualitas dari ketersediaan sarana dan prasarana jalan kampung, saluran air limbah, dan prasarana lainya untuk menunjang kesehatan dan kenyamanan lingkungan;
- Perlu peningkatan ketersediaan dan sebaran pelayanan air bersih pada kawasan-kawasam rawan air bersih yang belum terlayani jaringan PDAM Bojonegoro;
- 11. Perlu peningkatan kinerja pengolahan air limbah dan peningkatan akses masyarakat akan sanitasi pada kawasan rawan sanitasi.
- 12. Perlu peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana gedung daerah dan fasum penunjang pelayanan publik;
- 13. Perlu penyediaan produk-produk rencana tata ruang dan rencana teknis pembangunan infrastruktur perkotaan dibidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan;
- 14. Perlu penyediaan sarana dan prasarana penunjang operasional dan optimalisasi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- 15. Melakukan sinergi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka mengurangi luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan;
- 16. Perlu penyediaan pedoman harga standar bangunan gedung negara;

- 17. Perlu penyediaan sistem informasi dan data base jasa konstruksi setiap tahun;
- 18. Perlu pelayanan masyarakat dalam pengurusan ijin pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW;
- 19. Perlunya peningkatan layanan atas pengaduan masyarakat di bidang pembangunan infrastruktur;
- 20. Penanganan kawasan kumuh prioritas, baik dalam konteks pemugaran, peremajaan, re-settlement maupun pencegahan kumuh kembali;
- 21. Penambahan ruang terbuka hijau perkotaan baik melalui akuisisi PSU pengembang, pengadaan lahan, maupun mekanisme lainnya terhadap pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh, cadangan air tanah, penanganan kebencanaan;
- 22. Perlunya percepatan rintisan Smart PJU/PJL agar bisa segera melangkah pada tahap lanjutan dari modernisasi layanan yang telah dirancang.

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Tujuan/		K	Urusan/ Bi Urusar Pemerinta Kode Daerah d		Indikator Kinerja Program /	Satuan Indikato			Target Kinerja & Anggaran Renja Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun	
"	Sasaran		•	ouc	Program/	Kegiatan/ Sub Kegiatan	r	K	tenstra)	DI	evaluasi		1	"					1 anun 1 (%)
					Kegiatan/ Sub Kegiatan			К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	K	Rp
1	2			3	4	5	6		7	9			10		11	14 = 10	+11+12+13	15 = 14	·/9*100
						NTAHAN WAJIB YA													
					NTAHAN BIDANG				AN RUAN	G									
					DINAS PERUMAH	AN, KAWASAN PE	RMUKIMA	N DAN C	IPTA KARYA										
	terhadap Permukii	atn p pe mar	layar	puasan m an Infras Keciptak															
		tnya			an dan kawasan k masyarakat	Persentase Rumah Layak huni yang tersedia	%	100		100		96,94		97,05		97,05	-	97,05	
						Persentase Rumah tangga berakses air minum	%	24,66		23,1		22,64		22,64		22,64	-	98,01	
						Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi dasar	%	91,61		90,8		90,26		90,31		90,31	-	99,46	
						Persentase sarana dan prasarana sistem drainase wilayah kota yang memadai	%	66,98		58,49		53,42		53,62		53,62	-	91,67	
						Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	%	53,66		58,68		51,22		51,22		51,22	-	87,29	
						Persentase PJU yang berfungsi	%	41,44		41,13		34,31		34,31		34,31	-	83,42	
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas bangunan gedung strateg dan publik yang layak					Rasio bangunan gedung aparatur dan publik yang layak	%	81,03		81,82		80,8		80,95		80,95	-	98,94	

l. 1 Tabel 2.1

No	No Sasaran		Kode		Kode										Kode	Kode			Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikato r	sampa 2026 (jet Renstra ii pada Tahun Akhir Periode Renstra)	Angg Tahu	et Kinerja & garan Renja n 2024 yang ievaluasi	R	ealisasi Kinerj	a Pada [·]	Friwulan II	Kinerj	sasi Capaian a & Anggaran A Tahun 2024	Cap Kine Angg RENJA	gkat aian rja & garan Tahun ! (%)
							Kegiatan Kegiatan			K	Rp	K	Rp	К	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
1	2			3			4	5	6		7		9		10		11	14 = 1	0+11+12+13	15 = 14	1/9*100															
		1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR	Presentase rumah tangga dengan akses air minum	%	24,66	382.884.758.762	23,1	165.932.488.620	22,64	1.591.298.458	22,64	7.997.779.246	22,64	9.589.077.704	98,01	5,78															
		1	03	03	2.01	1	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana air minum yang dibangun (Unit)	Unit	210	382.884.758.762	112	165.932.488.620	0	1.591.298.458	0	7.997.779.246	0	9.589.077.704	0,00	5,78															
		1	03	03	2.01	1 003	²² Sub Kegiatan : Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	SR	7500	382.884.758.762	1846	165.932.488.620	0	1.591.298.458	0	7.997.779.246	0	9.589.077.704	0,00	5,78															
		1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi dasar	%	91,61	57.895.851.024	90,8	41.731.334.400	90,26	1.129.474.682	90,31	436.437.523	90,31	1.565.912.205	99,46	3,75															
		1	03	05	2.03	1	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi dasar yang dibangun (Unit)	Unit	5	57.895.851.024	2234	41.731.334.400	0	1.129.474.682	0	436.437.523	0	1.565.912.205	0,00	3,75															
		1	03	05	2.0	1 003	Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	9	1.476.000.000	3	492.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00															

Hal. 2 Tabel 2.1

No	No Tujuan/ Sasaran		Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikato r	sampa 2026 (get Renstra ni pada Tahun Akhir Periode Renstra)	Angg Tahu	et Kinerja & garan Renja n 2024 yang ievaluasi	Realisasi Kiner		a Pada [·]	Triwulan II	Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RENJA Tahun 2024 (%)	
						Kegiatan/ Sub Kegiatan			К	Rp	K	Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	K	Rp
1	2			3		4	5	6		7		9		10		11	14 = 1	0+11+12+13	15 = 14	1/9*100
		1 03 05 2.01 00		2.01	Air Limbah	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	1500	56.419.851.024	2234	41.239.334.400	0	1.129.474.682	0	436.437.523	0	1.565.912.205	0,00	3,80	
		1	03	06		Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Presentase sarana dan prasarana sistem drainase yang memadai	%	66,98	326.493.570.109	58,49	144.213.450.109	53,42	481.477.252	53,62	26.773.284.534	53,62	27.254.761.786	91,67	18,90
		1	03	06	2.01	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota	Panjang sarana dan prasarana sistem drainase yang dibangun (m')	m'	52055,9	326.493.570.109	38263	144.213.450.109	0	481.477.252	1525,9	26.773.284.534	1525,9	27.254.761.786	3,99	18,90
		1	03	06	2.01	Oli Sub Kegiatan: Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	m'	52055,9	313.293.570.109	38263	139.037.453.045	0	138.384.000	1525,9	26.138.037.000	1525,9	26.276.421.000	3,99	18,90
		1	03	06	2.01	Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	m'	33000	13.200.000.000	9750	3.877.417.000	550	148.004.726	3929	407.996.042	4479	556.000.768	45,94	14,34
		1	03	06	2.01	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana,Kebijakan , Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Dokumen	0	-	4	1.298.580.064	0	195.088.526	0	227.251.492	0	422.340.018	0,00	32,52

Hal. 3 Tabel 2.1

No	Tujuan/ Sasaran			Kod	e	-1	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub	Satuan Indikato r	sampa 2026 (get Renstra ni pada Tahun Akhir Periode Renstra)	Angg Tahu	et Kinerja & garan Renja n 2024 yang ievaluasi	R	ealisasi Kinerj	a Pada [·]	Triwulan II	Kinerj	sasi Capaian a & Anggaran A Tahun 2024	Cap Kine Angg RENJA	gkat aian rja & garan Tahun
							Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kegiatan		К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	K	Rp
1	2			3		_	4	5	6		7		9		10		11	14 = 1	0+11+12+13	15 = 14	/9*100
		1	03	80		P P E	Program: PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan gedung aparatur dan publik yang layak fungsi	%	81,03	598.150.973.821	81,82	235.722.308.531	80,8	157.666.546	80,95	19.338.275.132	80,95	19.495.941.678	98,94	8,27
		1	03	08	2.01	P E d K P N E d		Jumlah Bangunan Gedung Daerah yang baik fungsi (Unit)	Unit	174	598.150.973.821	52	235.722.308.531	0	157.666.546	8	19.338.275.132	8	19.495.941.678	15,38	8,27
		1	03	08	2.01	P E u S	Bangunan Gedung	Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang	Banguna n Gedung	54	43.883.893.750	19	38.432.204.217		34.558.046	2	879.530.023	2	914.088.069	10,53	2,38
		1	03	08	2.01	P P P B u	Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	360	553.056.601.296	85	196.297.124.814		92.658.500	26	18.365.135.109	26	18.457.793.609	30,59	9,40
		1	03	80	2.01	P P	Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraann ya	Orang	157	564.258.775	20	674.231.000		30.450.000	13	72.450.000	13	102.900.000	65,00	15,26

Hal. 4 Tabel 2.1

N		Гијиап/ Sasaran			Ко	de		Urusan/ Bidan Urusan Pemerintahar Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub	Satuan Indikato r	samp 2026	get Renstra ai pada Tahun (Akhir Periode Renstra)	Ang Tahu	et Kinerja & garan Renja n 2024 yang ievaluasi	R	ealisasi Kiner	ja Pada	Triwulan	Kinerj	sasi Capaian a & Anggaran A Tahun 2024	Cap Kine Angg RENJA	gkat aian rja & garan Tahun I (%)
								Kegiatan/ Sui Kegiatan	'		к	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp
	L	2			3			4	5	6		7		9		10		11	14 = 1	0+11+12+13	15 = 14	1/9*100
			1	03	08	2.0	01	ous Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedun (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedun (SBKBG), Rencan Teknis Pembongkaran Bangunan Gedun (RTB), Tim Profee Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, da Pendataan Bangunan Gedun melalui SIMBG	Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	575	646.220.000	2	318.748.500		-	0	21.160.000	0	21.160.000	0,00	6,64
			1					PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah korban bencana yang tertangani	%	100	1.500.000.000	100	500.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00
			1	04	02	2.0)3	Kegiatan : Pembangunan da Rehabilitasi Ruma Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah n Korban Bencana ih atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	60	1.500.000.000	15	500.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00
			1	04	02	2.0)3	Sub Kegiatan: Rehabilitasi Ruma bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	60	1.500.000.000	15	500.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00

Hal. 5 Tabel 2.1

No	Tujua Sasar			K	ode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikato r	sampa 2026 (get Renstra ai pada Tahun Akhir Periode Renstra)	Angg Tahu	et Kinerja & garan Renja n 2024 yang ievaluasi	R	ealisasi Kinerj	a Pada [·]	Triwulan II	Kinerj	sasi Capaian a & Anggaran A Tahun 2024	Cap Kine Angg RENJA	gkat aian rja & garan Tahun ! (%)
							Kegiatan			K	Rp	к	Rp	К	Rp	К	Rp	к	Rp	K	Rp
1	2				3		4	5	6		7		9		10		11	14 = 1	0+11+12+13	15 = 14	1/9*100
			1 (04 03	3		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah layak huni yang tersedia	%	100	37.500.000.000	100	29.513.012.300	96,94	92.473.528	97,05	802.871.981	97,05	895.345.509	97,05	3,03
			1 (03	3 2.03	3		Jumlah rumah layak huni yang tersedia (Unit)	Unit Rumah	20377	37.500.000.000	22528	29.513.012.300	21839	92.473.528	21839	802.871.981	21839	895.345.509	96,94	3,03
		1	1 (04 03	3 2.03	3 0002	Sub Kegiatan: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Unit Rumah	1500	30.000.000.000	721	23.562.172.300	0	92.473.528	24	749.520.981	24	841.994.509	3,33	3,57
		1	1 (03	3 2.03	3 0003	Sub Kegiatan: Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dokumen	2500	7.500.000.000	1179	5.950.840.000	0	-	138	53.351.000	138	53.351.000	11,70	0,90
		1	1 (04 09	5		Program: PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase rumah yang terfasilitasi PSU	%	100	7.946.000.000	49,9	124.492.760.384	42,76	246.990.912	42,76	20.258.116.864	42,76	20.505.107.776	85,69	16,47
		1	1 (04 0	2.0	1	Kegiatan: Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah rumah yang terfasilitasi PSU	Unit Rumah	5639	7.946.000.000	5483	124.492.760.384	0	246.990.912	0	20.258.116.864	0	20.505.107.776	0,00	16,47
		1	1 (0.9	5 2.0	1 0002	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	2690	7.436.000.000	5189	58.676.771.976	0	223.467.912	0	14.015.395.156	0	14.238.863.068	0,00	24,27

Hal. 6 Tabel 2.1

No	Tujuan/ Sasaran Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub	Satuan Indikato r	sampa 2026 (get Renstra ai pada Tahun (Akhir Periode Renstra)	Ang Tahu	et Kinerja & garan Renja In 2024 yang ilevaluasi	R	Realisasi Kinerja	a Pada	Triwulan II	Kinerj	isasi Capaian ia & Anggaran A Tahun 2024	Cap Kine Angg RENJA	gkat paian erja & garan 1 Tahun				
								Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kegiatan		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2			3	3			4	5	6		7		9		10		11	14 = 1	L0+11+12+13	15 = 14	4/9*100
		1	04	05	2.	01	1	Sub Kegiatan: Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi			5	1.000.000.000	0	-	0	39.707.000	0	39.707.000	0,00	3,97
		1	04	05	2.	01	 	Sub Kegiatan: Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi			294	64.645.988.408	0	17.523.000	0	6.197.714.708	0	6.215.237.708	0,00	9,61
		1	04	05	2.	01	!	Sub Kegiatan: Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	15	510.000.000	5	170.000.000	0	6.000.000	0	5.300.000	0	11.300.000	0,00	6,65
		2	10	04				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi	%	100	750.000.000	100	8.250.000.000	0	29.650.479	0	14.534.000	0	44.184.479	0,00	0,54
		2	10	04	2.	01	!	Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang terfasilitasi (Kasus)	Kasus	6	750.000.000	2	8.250.000.000	0	29.650.479	0	14.534.000	0	44.184.479	0,00	0,54
		2	10	04	2.	01	: :	Sub Kegiatan: Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	6	750.000.000	2	8.250.000.000	0	29.650.479	0	14.534.000	0	44.184.479	0,00	0,54
	Sasaran 3		ر ال	ıntr	ahili	itac	Kino	erja dan Pelayanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78	-	76	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00

Hal. 7 Tabel 2.1

No	Tujuan/ Sasaran				Daerah dan Program/	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikato r	sampa 2026 (get Renstra ai pada Tahun (Akhir Periode Renstra)	Ango Tahu	et Kinerja & garan Renja n 2024 yang ievaluasi	R	ealisasi Kinerja	a Pada [·]	Triwulan II	Kinerj	isasi Capaian ja & Anggaran A Tahun 2024	Cap Kine Angg RENJA	gkat paian erja & garan A Tahun 4 (%)	
						Kegiatan/ Sub Kegiatan	_		K	Rp	К	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	К	Rp
1	2			3	3	4	5	6		7		9		10		11	14 = 1	0+11+12+13	15 = 14	4/9*100
							Nilai ZI (Zona Integritas)	Nilai	85	-	85	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00
							Penyerapan Anggaran (%)	%	95	-	93	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
		1	04	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	141.539.573.560	100	55.223.300.437	25	9.128.061.441	50	13.290.435.293	50	22,418,496,734	50,00	40,60
		1	04	01	2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	yang disusun	Dokumen	96	938.600.000	32	303.000.000	13	13.868.000	7	56.070.600	20	69.938.600	62,50	23,08
		1	04	01	2.01	- /	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	18	186.400.000	6	60.000.000	4	13.868.000	2	17.432.900	6	31.300.900	100,00	52,17
		1	04	01	2.01	Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	6	179.200.000	2	58.000.000	0	-	0	11.833.100	0	11.833.100	0,00	20,40
		1	04	01	2.01	Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	6	81.000.000	2	25.000.000	0	-	0	4.121.500	0	4.121.500	0,00	16,49

Hal. 8 Tabel 2.1

No	Tujuan/ Sasaran			Ко	de	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikato r	sampa 2026 (get Renstra ai pada Tahun (Akhir Periode Renstra)	Ang Tahu	et Kinerja & garan Renja n 2024 yang ievaluasi	ı	Realisasi Kinerja	a Pada	Triwulan II	Kinerj	sasi Capaian a & Anggaran A Tahun 2024	Cap Kine Angg RENJA	gkat paian erja & garan 1 Tahun
						Kegiatan/ Sub Kegiatan	_		K	Rp	K	Rp	К	Rp	K	Rp	к	Rp	К	Rp
1	2			3	3	4	5	6		7		9		10		11	14 = 1	0+11+12+13	15 = 14	4/9*100
					2.01	Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	48	126.000.000	16	40.000.000	4	-	4	19.450.500	8	19.450.500	,	48,63
		1	04	01	2.01	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	18	366.000.000	6	120.000.000	5	-	1	3.232.600	6	3.232.600	100,00	2,69
		1	04	01	2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun (laporan)	Laporan	48	35.919.253.560	16	13.603.603.624	4	872.638.431	4	4.426.860.141	8	5.299.498.572	50,00	38,96
		1	04	01	2.02	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bu lan	213	30.820.963.560	71	11.904.173.624	71	844.808.431	71	3.889.830.741	71	4.734.639.172	100,00	39,77
		1	04	01	2.02	Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	36	4.432.290.000	12	1.477.430.000	3	-	3	490.635.800	6	490.635.800	50,00	33,21
		1	04	01	2.02	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	36	339.000.000	12	113.000.000	3	14.520.000	3	28.236.000	6	42.756.000	50,00	37,84
		1	04	01	2.02		Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Dokumen	36	112.800.000	12	37.600.000	3	6.050.000	3	8.656.800	6	14.706.800	50,00	39,11

Hal. 9 Tabel 2.1

No	Tujuan/ Sasaran		Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikato r	sampa 2026 (get Renstra ii pada Tahun Akhir Periode Renstra)	Ango Tahu	et Kinerja & garan Renja n 2024 yang ievaluasi	F	Realisasi Kinerja	a Pada '	Triwulan	Kinerj	isasi Capaian a & Anggaran A Tahun 2024	Cap Kine Angg RENJA	gkat Paian Prja & Paran Tahun
							Kegiatan Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	к	Rp	К	Rp
1	2			3			4	5	6		7		9		10		11	14 = 1	0+11+12+13	15 = 14	1/9*100
		1	04	01	2.02	0005		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	3	109.200.000	1	36.400.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00
		1	04	01	2.02	0007	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	48	105.000.000	16	35.000.000	4	7.260.000	4	9.500.800	8	16.760.800	50,00	47,89
		1	04	01	2.05	;	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun (laporan)	Laporan	12	885.000.000	4	294.506.055	0	63.404.600	1	26.012.000	1	89.416.600	25,00	30,36
		1	04	01	2.05	0003	Sub Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	510.000.000	4	168.506.055	1	63.404.600	3	26.012.000	4	89.416.600	100,00	53,06
					2.05			Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	78	375.000.000	26	126.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00
		1	04	01	2.06)	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang tersedia	Paket	81	4.037.790.000	27	1.098.356.065	0	101.699.208	13	177.365.144	13	279.064.352	48,15	25,41

Hal. 10 Tabel 2.1

No	Tujuan/ Sasaran		Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikato r	sampa 2026 (get Renstra ai pada Tahun (Akhir Periode Renstra)	Ang Tahu	et Kinerja & garan Renja n 2024 yang ievaluasi	F	Realisasi Kinerja	a Pada	Triwulan II	Kinerj	sasi Capaian a & Anggaran A Tahun 2024	Cap Kine Angg RENJA	gkat paian erja & garan A Tahun 4 (%)
							Kegiatan/ Sub Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	К	Rp	K	Rp
1	2			3			4	5	6		7		9		10		11	14 = 1	0+11+12+13	15 = 14	4/9*100
		1	04	01	2.06	0001	Komponen Instalasi	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	9	360.000.000	3	22.242.400	0	18.542.550	0	-	0	18.542.550	0,00	83,37
		1	04	01	2.06	0002	Peralatan dan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	30	450.000.000	10	219.679.019	1		8	57.471.044	9	57.471.044	90,00	26,16
		1	04	01	2.06	0003	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	18	510.000.000	6	107.060.400	1	56.656.658	5	-	6	56.656.658	100,00	52,92
		1	04	01	2.06	0004		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	9	850.000.000	3	24.435.000	1	-	1	-	2	-	66,67	0,00
		1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	9	144.000.000	3	40.021.540	0	-	2	15.575.500	2	15.575.500	66,67	38,92
		1	04	01	2.06		Bacaan dan Peraturan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	Dokumen	9	30.960.000	3	12.960.000	0	-	3	1.300.000	3	1.300.000	100,00	10,03
		1	04	01	2.06		,	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	6	13.980.000	2	4.435.406	0	-	1	4.253.600	1	4.253.600	50,00	95,90
		1	04	01	2.06		Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	60	756.000.000	20	566.520.900	3	26.500.000	4	62.845.000	7	89.345.000	35,00	15,77

Hal. 11 Tabel 2.1

No	Tujuan/ Sasaran		Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub	Satuan Indikato r	samp 2026	get Renstra ai pada Tahun (Akhir Periode Renstra)	Ang Tahu	et Kinerja & garan Renja n 2024 yang ievaluasi	ı	Realisasi Kinerja	a Pada	Triwulan	Kinerj	isasi Capaian ia & Anggaran A Tahun 2024	Cap Kine Angg RENJA	gkat Paian Prja & Garan A Tahun
							Kegiatan/ Sub	Kegiatan									_		_		
							Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2			3			4	5	6		7		9		10		11				1/9*100
		1	04	01	2.06	001:	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dokumen	36	922.850.000	12	101.001.400	4	-	4	35.920.000	8	35.920.000	66,67	35,56
		1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (jenis)	Unit	82	1.150.000.000	6	614.841.437	0	356.795.000	2	69.452.700	2	426.247.700	33,33	69,33
		1	04	01	2.07	000		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	70	1.150.000.000	20	614.841.437	2	356.795.000	18	69.452.700	20	426.247.700	100,00	69,33
		1	04	01	2.08		Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Laporan	57	94.981.500.000	8	37.580.884.056	0	7.601.960.402	2	8.359.204.958	2	15.961.165.360	25,00	42,47
		1	04	01	2.08	000	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	9	90.000.000.000	3	36.072.000.000	1	7.453.230.080	2	7.905.278.975	3	15.358.509.055	100,00	42,58
		1	04	01	2.08	000	Pelayanan Umum	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	36	4.981.500.000	12	1.508.884.056	3	148.730.322	9	453.925.983	12	602.656.305	100,00	39,94

Hal. 12 Tabel 2.1

No	Tujuan/ Sasaran	TO KODE I DESERBITED DE				Pen Da P	Urusan nerintahan nerah dan rogram/	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikato r	sampa 2026 (get Renstra ai pada Tahun (Akhir Periode Renstra)	Angg Tahu	et Kinerja & garan Renja n 2024 yang ievaluasi	F	Realisasi Kinerj	a Pada	Triwulan	Kinerj	sasi Capaian a & Anggaran A Tahun 2024	Cap Kine Angg RENJA	gkat aian rja & garan Tahun ! (%)
						, ,	•			K	Rp	K	Rp	к	Rp	K	Rp	к	Rp	K	Rp
1	2			3			4	5	6		7		9		10		11	14 = 1	0+11+12+13	15 = 14	1/9*100
		1	04 (01 7	2.09	Baran Daera Urusa	liharaan g Milik ih Penunjang in rintahan	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Unit	528	3.627.430.000	176	1.728.109.200	0	117.695.800	57	175.469.750	57	293.165.550	32,39	16,96
		1	04 (01 2	2.09	Penye Pemel Biaya Pemel Pajak Perizii Kenda	liharaan, dan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	75	880.000.000	25	689.521.300	0	92.060.350	6	130.224.700	6	222.285.050	24,00	32,24
		1	04 (01 :	2.09	Pemel Perala	legiatan: liharaan atan dan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	450	647.430.000	150	315.930.000	25	25.635.450	57	45.245.050	82	70.880.500	54,67	22,44
		1	04 (01 :	2.09	Pemel bilitas Kanto	egiatan: liharaan/Reha si Gedung or dan unan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	Unit	3	600.000.000	1	222.657.900	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00
		1	04 (01 7	2.09	Pemel bilitas Prasai Kanto	si Sarana dan rana Gedung or atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	Unit	9	1.500.000.000	3	500.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00
						JUMLA	H TOTAL			1.554	4.660.727.276	805	5.578.654.781	12	2.857.093.298	88	.911.734.573	10:	1.768.827.871		12,63
												7	TOTAL RATA-RA	ATA CAF	PAIAN KINERJA	DAN A	NGGARAN DAI	RI SELUF	RUH PROGRAM	16,05	12,63
													PR	REDIKA	T KINERJA DAI	RI SELUI	RUH PROGRAM	Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Hal. 13 Tabel 2.1

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang dilaksanakan melalui strategi dan kebijakan, maka sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan serta permasalahan dan isu strategis di bidang pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan di daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro menetapkan Program, kegiatan, indikator kinerja serta kelompok sasaran.

Rencana program ini merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus pengejawantahan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 dan RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

Untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab diperlukan strategi dalam merealisasikan target-target kinerja yang akan dicapai yaitu dengan menyusun cascading kinerja agar tercapai sinkronisasi dan konsistensi dalam perencanaan penganggaran, pengukuran dan pelaporan kinerja sehingga tercapai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan nilai yang baik dan sangat memuaskan. Sakip terlihat dari berjalannya mekanisme analisis dan dan evaluasi dengan melibatkan seluruh unsur pejabat teknis dan pimpinan. Sakip mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro, juga didukung oleh Tujuan 5 RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026 yaitu Mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan ekonomi antar wilayah berbasis risiko dan pembangunan berkelanjutan yang diselaraskan denganTujuan Renstra DPKPCK yaitu Meningkatnya Infrastruktur Permukiman dan keciptakaryaan yang dilaksanakan

oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan pemahaman tersebut dan dengan memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, maka Program dan Kegiatan Pokok Pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

- A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR.
 - A.1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.
 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
 - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
 Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.
 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan
 Perpipaan.
 - 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
 - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota.
 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);
 - Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik
 (SPALD) Setempat.
 - 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase.
 - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota.
 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan;
 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan;
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
 - 4. Program Penataan Bangunan Gedung.

- a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
 - Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota;
 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan
 Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan
 Strategis Daerah Kabupaten/Kota;
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG.
- 5. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.
 - a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota.
 - Pemeliharaan sarana dan prasarana permakaman;
 - Pembangunan dan rehabilitasi jalan lingkungan perkotaan;

A.2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- 6. Program Pengembangan Perumahan.
 - a. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana.
- 7. Program Kawasan Permukiman.
 - a. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan
 Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.
 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
 - Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU.

- 8. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu).
 - a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.
 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian;
 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian;
 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan;
 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang.
- 9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan;
 - Penyediaan Bahan/Material;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR.
 - B.1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN.
 - 1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

- a. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
 - Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

3.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2024

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 terdiri dari 10 (sepuluh) program dan 15 (lima belas) kegiatan, 47 (empat puluh tujuh sub kegiatan) dengan total kebutuhan dana/ pagu indikatif untuk belanja langsung mencapai Rp. 939.137.574.781,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

Adapun rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sebagaimana Tabel 3.1.

Adapun Rancangan penetapan kinerja pada Perubahan APBD Tahun 2024 dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro adalah sebagaimana Tabel 3.2.

TABEL 3.2

RANCANGAN PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN APBD TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN
BOJONEGORO

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Meningkatnya akses perumahan	Persentase		Program : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	47.351.763.930
dan kawasan permukiman yang layak untuk masyarakat	Rumah Layak huni yang tersedia	100%	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	47.351.763.930

		Program: PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.015.000.000
		Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	2.015.000.000
		Program: PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	500.000.000
		Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	500.000.000
Persentase Rumah tangga	22.400/	Program: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	186.411.808.290
berakses air minum	23,10%	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota	186.411.808.290
Persentase		Program: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	71.407.980.468
Rumah tangga dengan akses sanitasi dasar	90,80%	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota	71.407.980.468
Persentase sarana dan		Program: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	200.300.116.949
prasarana sistem drainase wilayah kota yang memadai	58,49%	Kegiatan : Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab/Kota	200.300.116.949

	Persentase jalan lingkungan permukiman	58,68%	Program: PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	69.982.256.583
	dalam kondisi baik		Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	69.982.256.583
	Persentase PJU yang	41,13%	Program: PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	69.871.618.176
	berfungsi baik		Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	69.871.618.176
Meningkatnya			Program : PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	222.915.249.339
kualitas bangunan gedung strategis dan publik yang layak	Rasio bangunan gedung	81,82%	Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	222.915.249.339
	aparatur dan publik yang layak fungsi		Program: PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	8.250.000.000
			Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kab/Kota	8.250.000.000
	Nilai SAKIP	76	Program: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	60.131.781.046
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan	Nilai ZI (Zona Integritas)	85	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	563.000.000
Pelayanan	Penyerapan Anggaran	93%	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.274.379.263
			Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	294.505.900

		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	972.746.565
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.903.262.772
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.898.652.346
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusar Pemerintah Daerah		2.225.234.200
		JUMLAH ANGGARAN	939.137.574.781

Tabel 3.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2023

10	URUSAN/ BIDANG	PROGRAM / KEGIAT	AN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM ((OUTPUT)/ SUB KEGI		T/	ARGET KINER	:JA	SATUAN		PAGU	
	URUSAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHA N RKPD 2024	INDIKATOR	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Program: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Presentase rumah tangga dengan akses air minum	Presentase rumah tangga dengan akses air minum	25,54%	23,10%	23,14%	%	150.908.818.120	165.932.488.620	186.411.808.290
		Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota	Jumlah sarana prasarana air minum yang dibangun (Unit)	•	70	112	138	Unit	150.908.818.120	165.932.488.620	186.411.808.290
		Sub Kegiatan : Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sub Kegiatan : Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	10999	1846	1985,43	SR	150.908.818.120	165.932.488.620	186.411.808.290
		Program: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Program: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi dasar	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi dasar	90,46%	90,80%	91,04%	%	15.617.000.000	41.731.334.400	71.407.980.468
		Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi dasar yang dibangun (Unit)	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi dasar yang dibangun (Unit)	951	2234	3295,74441	Unit	15.617.000.000	41.731.334.400	71.407.980.468
		Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	3	3	6	Unit	492.000.000	492.000.000	1.367.648.468
		Sub Kegiatan : Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Sub Kegiatan : Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	951	2234	3295,74441	Rumah Tangga	15.125.000.000	41.239.334.400	70.040.332.000
		Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Program: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Presentase sarana dan prasarana sistem drainase yang memadai	Presentase sarana dan prasarana sistem drainase yang memadai	51%	58,49%	60,74%	%	94.921.070.109	144.213.450.109	200.300.116.949

1 Tabel 3.1

N	URUSAN/ BIDANG	PROGRAM / KEGIAT	TAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM ((OUTPUT)/ SUB KEGI		TA	ARGET KINER	·JA	SATUAN		PAGU	
	URUSAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHA N RKPD 2024	INDIKATOR	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
		Kegiatan: Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab/Kota	Kegiatan : Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab/Kota	Panjang sarana dan prasarana sistem drainase yang dibangun (m')	Panjang sarana dan prasarana sistem drainase yang dibangun (m')	31617	38263	55277,0	m'	94.921.070.109	144.213.450.109	200.300.116.949
		Sub Kegiatan: Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Sub Kegiatan: Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	31617	38263	55277	m'	89.772.490.045	139.037.453.045	192.047.098.585
		Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	11000	7296	12756,2	m'	3.850.000.000	3.877.417.000	6.954.438.300
		Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana,Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	5	4,00	4,00	Dokumen	1.298.580.064	1.298.580.064	1.298.580.064
		Program : PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Program : PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan gedung aparatur dan publik yang layak fungsi	Rasio bangunan gedung aparatur dan publik yang layak fungsi	78%	0,8182	82,66%	%	179.724.929.990	235.722.308.531	222.915.249.339
		Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Daerah yang baik fungsi (Unit)	Jumlah Bangunan Gedung Daerah yang baik fungsi (Unit)	44	52	95	Unit	179.724.929.990	235.722.308.531	222.915.249.339
		Sub Kegiatan: Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan:	Sub Kegiatan: Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan:	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	14	19	26	Bangunan Gedung	35.352.212.382	38.432.204.217	27.631.167.860
		Sub Kegiatan: Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan: Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	114	85	203	Dokumen	143.532.954.108	196.297.124.814	194.291.101.979
		Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	47	20	20	Orang	459.650.000	674.231.000	674.231.000

pe 2 Tabel 3.1

NC	URUSAN/ BIDANG	PROGRAM / KEGIAT	AN / SUB KEGIATAN	`	OUTCOME) / KEGIATAN ATAN (SUB OUTPUT)	TA	ARGET KINER	:JA	SATUAN	PAGU		
	URUSAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHA N RKPD 2024	INDIKATOR	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
		Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	185	2	2	Dokumen	380.113.500	318.748.500	318.748.500
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program : PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Program : PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah korban bencana yang tertangani	Persentase rumah korban bencana yang tertangani	100%	100%	100%	%	500.000.000	500.000.000	500.000.000
		Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Terehabilitasi	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Terehabilitasi	20	15	15	Unit Rumah	500.000.000	500.000.000	500.000.000
		Sub Kegiatan : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	20	15	15	Unit Rumah	500.000.000	500.000.000	500.000.000
		Program : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Program : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah layak huni yang tersedia	Persentase rumah layak huni yang tersedia	85,76%	100,00%	100%	%	13.000.000.000	29.513.012.300	47.351.763.930
		Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah layak huni yang tersedia	Jumlah rumah layak huni yang tersedia	19321	22528	23229	Unit rumah	13.000.000.000	29.513.012.300	47.351.763.930
		Sub Kegiatan: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Sub Kegiatan: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	444	721	1422	Unit Rumah	10.000.000.000	23.562.172.300	41.041.616.930
		Sub Kegiatan: Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Sub Kegiatan: Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1000	1179	2634	Dokumen	3.000.000.000	5.950.840.000	6.310.147.000
		Program: PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Program: PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase rumah yang terfasilitasi PSU	Persentase rumah yang terfasilitasi PSU	43,32%	49,90%	52%	%	71.840.000.000	124.492.760.384	141.868.874.759

Page 3 Tabel 3.1

NO	URUSAN/ BIDANG	PROGRAM / KEGIAT	FAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM ((OUTPUT)/ SUB KEGI		T	ARGET KINER	JA	SATUAN		PAGU	
	URUSAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHA N RKPD 2024	INDIKATOR	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
		Kegiatan: Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kegiatan: Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah rumah yang terfasilitasi PSU	Jumlah rumah yang terfasilitasi PSU	302	5483	6027	Unit Rumah	71.840.000.000	124.492.760.384	141.868.874.759
		Sub Kegiatan: Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Sub Kegiatan: Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	169	5189	5698	Lokasi	43.370.000.000	58.676.771.976	69.871.618.176
		Sub Kegiatan: Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Sub Kegiatan: Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	5	5	7	Lokasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.845.000.000
		Sub Kegiatan: Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Sub Kegiatan: Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	128	294	329	Lokasi	27.300.000.000	64.645.988.408	69.982.256.583
		Sub Kegiatan: Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Sub Kegiatan: Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	5	5	5	Laporan	170.000.000	170.000.000	170.000.000
		Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	1	100%	100%	%	46.971.486.028	55.223.300.282	60.131.781.046
		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun (dokumen)	Jumlah dokumen yang disusun (dokumen)	32	32	35	Dokumen	303.000.000	303.000.000	563.000.000
		Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	7	Dokumen	60.000.000	60.000.000	160.000.000
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	2	Dokumen	58.000.000	58.000.000	58.000.000
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	2	Dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000

Page 4 Tabel 3.1

NO	URUSAN/ BIDANG	PROGRAM / KEGIAT	FAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM ((OUTPUT)/ SUB KEGI		T	ARGET KINER	:JA	SATUAN		PAGU	
	URUSAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHA N RKPD 2024	INDIKATOR	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	16	16	Laporan	40.000.000	40.000.000	40.000.000
		Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	8	Laporan	120.000.000	120.000.000	280.000.000
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun (laporan)	Jumlah laporan keuangan yang disusun (laporan)	16	16	16	Laporan	11.653.196.028	13.603.603.624	12.274.379.263
		Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71	71	71	Orang/ Bulan	9.953.766.028	11.904.173.624	10.351.531.263
		Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	Dokumen	1.477.430.000	1.477.430.000	1.677.430.000
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	12	Dokumen	113.000.000	113.000.000	136.418.000
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	12	Dokumen	37.600.000	37.600.000	37.600.000
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	Laporan	36.400.000	36.400.000	36.400.000
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan /Triwulan/Semesteran SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan /Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16	16	16	Laporan	35.000.000	35.000.000	35.000.000
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun (laporan)	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun (laporan)	4	4	4	Laporan	294.505.900	294.505.900	294.505.900
		Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	4	4	Dokumen	168.505.900	168.505.900	168.505.900

Page 5 Tabel 3.1

NC	URUSAN/ BIDANG	PROGRAM / KEGIAT	AN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM ((OUTPUT)/ SUB KEGI	,	TA	ARGET KINER	:JA	SATUAN		PAGU		
	URUSAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHA N RKPD 2024	INDIKATOR	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
		Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26	26	26	Orang	126.000.000	126.000.000	126.000.000	
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang tersedia (paket)	Jumlah administrasi umum yang tersedia (paket)	27	27	27	Paket	2.060.608.136	1.098.356.065	972.746.565	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	3	3	Paket	22.282.000	22.242.400	22.242.400	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	10	10	Paket	252.960.000	219.679.019	219.679.019	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	6	6	Paket	131.545.640	107.060.400	107.060.400	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	3	3	Paket	336.520.000	24.435.000	24.435.000	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	3	Paket	40.095.000	40.021.540	40.021.540	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	3	3	Dokumen	12.960.000	12.960.000	12.960.000	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan / Material	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	2	2	Paket	4.438.800	4.435.406	4.435.406	
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	20	20	Laporan	566.674.000	566.520.900	440.911.400	
		Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12	12	Dokumen	693.132.696	101.001.400	101.001.400	
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (Unit)	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (Unit)	20	20	35	Unit	195.360.000	614.841.437	5.903.262.772	
		Sub Kegiatan : Pengadaan Peralataan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralataan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	20	35	Unit	195.360.000	614.841.437	5.903.262.772	
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan (laporan)	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan (laporan)	8	19	19	Laporan	31.169.643.764	37.580.884.056	37.898.652.346	

e 6 Tabel 3.1

NC	URUSAN/ BIDANG	PROGRAM / KEGIAT	AN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT)/ SUB KEGI	OUTCOME) / KEGIATAN ATAN (SUB OUTPUT)	TA	ARGET KINER	:JA	SATUAN		PAGU	
	URUSAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHA N RKPD 2024	INDIKATOR	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	3	Laporan	29.732.534.708	36.072.000.000	36.262.000.000
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	Laporan	1.437.109.056	1.508.884.056	1.636.652.346
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (Unit)	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (Unit)	176	176	176	Unit	1.295.172.200	1.728.109.200	2.225.234.200
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	25	25	Unit	354.700.000	689.521.300	738.271.300
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150	150	150	Unit	216.030.000	315.930.000	315.930.000
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	1	Unit	224.442.200	222.657.900	671.032.900
		Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	3	3	Unit	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Program : PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Program : PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi	Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi	100%	100%	100%	%	250.000.000	8.250.000.000	8.250.000.000
		Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kab/Kota	Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang terfasilitasi (Kasus)	Jumlah sengketa tanah garapan yang terfasilitasi (Kasus)	2	2	2	Kasus	250.000.000	8.250.000.000	8.250.000.000
		Sub Kegiatan : Inventasi Sengketa ,Konflik,dan Perkara Pertahanaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan : Inventasi Sengketa ,Konflik,dan Perkara Pertahanaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	2	2	Dokumen	250.000.000	8.250.000.000	8.250.000.000
				JUMLAH		_			_	573.733.304.247	805.578.654.626	939.137.574.781

Page 7 Tabel 3.1

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 penyusunannya berpedoman pada Perubahan RKPD yang merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta urusan Pertanahan di Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 disusun dalam rangka mencapai tingkat keberhasilan terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sasaran pembangunan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan II (semester I), maka diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh komponen/unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi sesuai beban kerja yang diamanahkan.

Akhirnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya serta mendukung Kabupaten Bojonegoro yang produktif dan energik.